

**PENGENDALIAN INFLASI DALAM PERSPEKTIF  
EKONOMI ISLAM**  
**(Studi Efektivitas Instrumen Moneter Syari'ah di Lampung)**

**Fitri Kurniawati, M.E.Sy.<sup>1</sup>**  
**Program Studi Ekonomi Syariah**  
**Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatra Utara, Medan**  
[pi2t\\_ajah22@yahoo.com](mailto:pi2t_ajah22@yahoo.com)

**Abstrak**

Inflasi merupakan kenaikan tingkat harga umum. Inflasi terjadi disebabkan oleh beberapa hal diantaranya *natural inflation, human error inflation, cost push inflation, spiralling inflation, imported inflation*. Di Indonesia inflasi terus naik dan kesenjangan social ekonomi makin lebar. Penyebaran inflasi yang terjadi di Indonesia tidaklah merata. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter tertinggi di Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengendalian inflasi dengan menggunakan instrumen moneter syariah di Lampung dan untuk mengetahui keefektifan instrumen moneter syariah terhadap pengendalian inflasi di Lampung. Berdasarkan dari analisa data diperoleh bahwa Inflasi di Lampung terjadi karena dua sebab yaitu *Natural Inflation* (Inflasi Alamiah) dan *Human Error Inflation* (Inflasi karena Kesalahan Manusia). Ada dua jenis kebijakan moneter yang dilakukan di Indonesia, kebijakan ekspansif dan kebijakan kontraktif. Di Lampung pengendalian inflasi menggunakan instrumen moneter syariah masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi dalam pelaksanaannya. SBSN yang ada di Lampung. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa instrumen moneter syari'ah di Lampung sudah terlihat cukup menggeliatkan perekonomian, hanya saja belum merata. Instrumen moneter syariah terhadap pengendalian inflasi di Lampung masih belum begitu efektif dikarenakan belum meratanya pembangunan yang menggunakan investasi sukuk negara (SBSN) ini. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pembaca untuk pemahaman lebih mendalam mengenai pengendalian inflasi melalui instrumen moneter Islam.

**Kata Kunci** : *Inflasi, instrumen moneter, instrumen moneter syariah*

**Abstract**

---

<sup>1</sup> Mahasiswi PPs UIN Sumatera Utara Medan

Inflation is an increase in the general price level. Inflation occurs due to several things including natural inflation, human error inflation, cost push inflation, spiraling inflation, imported inflation. In Indonesia inflation continues to rise and the socio-economic gap widens. The spread of inflation in Indonesia is not evenly distributed. Bank Indonesia as the highest monetary authority in Indonesia aims to achieve and maintain the stability of the rupiah value. The purpose of this study is to analyze the control of inflation by using sharia monetary instruments in Lampung and to determine the effectiveness of Islamic monetary instruments to control inflation in Lampung. Based on the analysis of the data obtained that inflation in Lampung occurs for two reasons, namely Natural Inflation and Human Error Inflation. There are two types of monetary policy carried out in Indonesia, expansionary policies and contractionary policies. In Lampung, controlling inflation using Islamic monetary instruments is still not optimal. This is due to a lack of coordination in its implementation. SBSN in Lampung. Based on the results of the study it can be concluded that the Shari'ah monetary instruments in Lampung have seen enough to stimulate the economy, except that they are not evenly distributed. Islamic monetary instruments to control inflation in Lampung are still not very effective due to the uneven development that uses this state sukuk investment (SBSN). This research is expected to help readers to get a deeper understanding of inflation control through Islamic monetary instruments.

**Keyword:** Inflation, monetary instruments, Islamic monetary instruments

## **A. Pendahuluan**

Inflasi ditandai dengan kenaikan harga barang-barang, adalah peristiwa moneter yang biasa dijumpai di hampir semua negara. Inflasi dapat menimbulkan keresahan masyarakat jika hal itu terjadi secara terus-menerus (berkepanjangan). Inflasi merupakan kenaikan tingkat harga umum,<sup>2</sup> inflasi seperti sebuah penyakit.<sup>3</sup> Sehingga hal ini harus dikendalikan. Kenaikan harga akan menyulitkan masyarakat terutama mereka yang berpenghasilan rendah dan yang berpenghasilan tetap. Jumlah uang yang sama diperoleh jumlah barang yang lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Secara umum, inflasi berarti kenaikan tingkat

---

<sup>2</sup> Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus, *Economics*, (New York : McGraw-Hill Inc. , 1992), h. 307

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 592

harga secara umum dari barang komoditas yang menyeluruh dari nilai unit penghitungan moneter.<sup>4</sup>

Salah satu cara mengendalikan inflasi adalah menggunakan kebijakan moneter. Kebijakan moneter didefinisikan dengan rencana dan tindakan otoritas moneter yang terkoordinasi untuk menjaga keseimbangan moneter, kestabilan nilai uang, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan, serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat.<sup>5</sup>

Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi inflasi antara lain:

1. Meningkatnya kegiatan ekonomi sehingga ada peningkatan permintaan agregat tidak diimbangi dengan meningkatnya penawaran agregat karena adanya kendala struktural perekonomian.
2. Melemahnya nilai tukar rupiah sehingga harga cenderung naik dan sulit untuk turun apabila nilai tukar rupiah menguat.
3. Kebijakan pemerintah di bidang harga dan pendapatan seperti kenaikan harga BBM, listrik, menaikkan upah minimum dan gaji pegawai.
4. Tingginya ekspektasi inflasi masyarakat, ada kecenderungan masyarakat yang sangat tinggi terhadap konsumsi sehingga memicu kenaikan harga.<sup>6</sup>

Pandangan sekuler<sup>7</sup> menyebutkan bahwa inflasi erat kaitannya dengan tingkat bunga.<sup>8</sup> Hal ini disebabkan adanya biaya untuk mempengaruhi uang yang

---

<sup>4</sup> Douglas Greenwald, *Encyclopedia of Economic*, (New York : McGraw-Hill Inc. , 1982), h. 510

<sup>5</sup> Aliminsyah, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan*, (Bandung: Yrama Widya, 2006), h. 186

<sup>6</sup> M. Ridwan, *Ekonomi Makro dan Mikro Islam*, (Jakarta : Citapustaka Media, 2013), h. 178

<sup>7</sup> Sekulerisme adalah pandangan dunia yang mendominasi dunia Barat. Pandangan ini memisahkan antara dunia dan akherat, agama dan negara. Dia menempatkan kekuatan akal untuk menemukan kebenaran metafisik secara final. Dia berkeyakinan bahwa tidak ada kehidupan setelah kematian, tidak ada pertanggungjawaban setelah mati. Dia berkeyakinan bahwa kebahagiaan hanya akan bisa dicapai dengan materi. Ia berpandangan dari segi utilitarianisme bahwa kebenaran dan kesalahan, kebaikan dan keburukan, ditentukan oleh sensasi kesenangan dan kesakitan. Apa saja yang mendatangkan kesenangan adalah baik lagi benar dan apa saja yang mendatangkan kesusahan adalah buruk lagi salah. Inilah yang menghasilkan konsep manusia ekonomi yang menjadi motor ekonomi sekuleris/kapitalis saat ini. Kepentingan pribadi adalah sumber gerakannya. Konsumsi adalah tujuan tertinggi kehidupannya, sumber utama kebahagiaannya dan pembenaran tertinggi segala usahanya.

beredar. Padahal sebenarnya inflasi hanya membutuhkan sedikit biaya untuk dikendalikan.<sup>9</sup> Bahkan inflasi yang rendahpun memiliki pengaruh yang besar terhadap efiseinsi ekonomi.<sup>10</sup> Karena inflasi erat kaitannya dengan masalah nilai uang.

Inflasi terjadi disebabkan oleh beberapa hal diantaranya *natural inflation* (inflasi yang terjadi karena sebab-sebab alamiah yang manusia tidak mempunyai kekuasaan dalam mencegahnya), *human error inflation* (inflasi yang terjadi karena kesalahan manusia sendiri), terdapatnya unsur bunga yang dapat mempengaruhi perekonomian, *demand pull inflation* (inflasi yang dikibatkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi pada sisi permintaan dari barang-barang dan jasa pada suatu perekonomian), *cost push inflation* (inflasi yang terjadi karena adanya perubahan-perubahan pada sisi penawaran dari barang dan jasa pada suatu perekonomian, *spiralling inflation* (inflasi yang diakibatkan oleh inflasi yang terjadi sebelumnya, yang mana itu terjadi sebagai akibat dari inflasi yang terjadi sebelumnya lagi dan begitu seterusnya), *imported inflation* (inflasi di negara lain karena ikut perdagangan internasional).<sup>11</sup>

Di Indonesia kesatabilan ekonomi terus memburuk yang direfleksikan dalam pasar komoditi, saham dan pertukaran nilai mata uang. Dalam konsepsi Islam, orientasi ekonomi haruslah memperjuangkan nasib rakyat kecil serta kesejahteraan rakyat banyak, yang dalam teori *ushul fiqh* dinamakan *al maslahah*

---

Segala upaya individu untuk memenuhi kebutuhannya adalah kebenaran sehingga harus dibiarkan bebas. Kehidupan ekonomi adalah arena persaingan yang diatur oleh system pasar bebas yang menjamin hukum rimba "siapa yang kuat dia yang menang". Padahal manusia itu tidak hanya fisik dan rasio tetapi juga memiliki ruh/jiwa. Pandangan sekuleris/kapitalis di atas telah menempatkan manusia seperti binatang sehingga tidak perlu campur tangan Tuhan dalam kehidupannya. Implikasi dari paham ini sangat fatal. (lihat : Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta : Gema Insani press, 1989), h. 20

<sup>8</sup> N. Gregory Mankiw, *Macro Economics*, (USA : Worth Publishers, 2007), h. 89-92

<sup>9</sup> Alan Blinder, *Hard Heads, Soft Hearts : Tough Minded Economics for a Just Society*, (M. A. Edison Wesley, 2007)

<sup>10</sup> Martin Feldstein, *The Cost and Benefits of Price Stability*, (Univ. Chicago Press, 1999)

<sup>11</sup> Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islami*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 138-139

*al ammah*. Sedangkan mekanisme yang digunakan untuk mencapai kesejahteraan itu tidaklah ditentukan format dan bentuknya.

Penyebaran inflasi yang terjadi di Indonesia tidaklah merata. Daerah yang paling rendah mengalami inflasi berdekatan dengan daerah yang inflasinya cukup tinggi. Di Indonesia kestabilan ekonomi terus memburuk yang direfleksikan dalam pasar komoditi, saham dan pertukaran nilai mata uang. Dalam konsepsi Islam, orientasi ekonomi haruslah memperjuangkan nasib rakyat kecil serta kesejahteraan rakyat banyak, yang dalam teori *ushul fiqh* dinamakan *al maslahah al ammah*.

Di Indonesia telah digunakan instrumen moneter syari'ah. Dalam operasi pasar terbuka, Walaupun pencapaian tujuan akhirnya tidak berbeda, namun dalam pelaksanaannya secara prinsip, moneter syari'ah berbeda dengan yang konvensional terutama dalam pemilihan target dan instrumennya. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter tertinggi di Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UUNo. 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia.

Penelitian ini penting untuk dilakukan untuk melihat seberapa efektif pengendalian inflasi dengan menggunakan instrumen moneter syari'ah. Karena inflasi yang dikendalikan dengan menggunakan instrumen konvensional dirasa belum berhasil. Berdasarkan uraian diatas penelitian ini sangat penting untuk dilakukan sehingga nantinya akan mengetahui bagaimana sesungguhnya pengendalian inflasi yang sesuai dengan syari'at Islam dan pandangannya pada kebijakan moneter yang ada di Indonesia selama ini serta apa yang dapat diimplementasikan pada kebijakan moneter di Indonesia yang dapat dilihat dalam perspektif ekonomi Islam.

## B. Landasan Teori

### 1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas. Secara istilah, efektivitas yaitu komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan<sup>12</sup>. Efektivitas menurut pengertian tersebut mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Definsi lain menyebutkan bahwa efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi.<sup>13</sup> efektivitas bisa diartikan sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang. Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.<sup>14</sup> Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*.

---

14 <sup>12</sup> Effendy, Onong Uchjana, *Kamus Komunikasi*, (Bandung : PT. Mandar Maju : 1989), h.

<sup>13</sup> Susanto, Astrid S., *Efektifitas*, (Bandung: Bina Cipta :1975), h. 156

<sup>14</sup> Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN : 2005), h. 92

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka efektivitas menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil guna daripada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target- targetnya. Hal ini berarti, bahwa pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki.

## **2. Instrumen Moneter Syari'ah**

### **a. Definisi Kebijakan Moneter**

Bank sentral merupakan bank yang memiliki otoritas untuk mengendalikan kondisi moneter di sebuah negara. Di ndonesia, otoritas ini dipegang oleh Bank Indonesia (BI). Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 1999, tujuan BI adalah mencapai kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Untuk mencapai tujuan Bank Indonesia tersebut di atas, antara lain mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga (3) bidang utama tugas Bank Indonesia. Tiga pilar itu adalah sebagai berikut. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Mengatur dan mengawasi bank.

#### **1) Pengertian Kebijakan Moneter**

Kebijakan moneter adalah langkah-langkah yang diambil oleh penguasa moneter (bank Central atau bank Indonesia)

untuk memengaruhi jumlah uang yang beredar atau daya beli uang. Caranya adalah dengan menggunakan instrumen-instrumen kebijakan moneter, seperti operasi pasar terbuka, kebijakan diskonto, rasio cadangan minimum, batas maksimum pemberian kredit dan moral suasion.

Melalui instrumen-instrumen tersebut akan terjadi perubahan jumlah uang yang beredar. Perubahan jumlah uang ini pada akhirnya akan memengaruhi kestabilan moneter agar lebih kondusif pertumbuhan ekonomi masyarakat. Keberhasilan kebijakan moneter biasanya diukur dari peningkatan kesempatan kerja, perbaikan neraca pembayaran dan perbaikan kualitas kerja.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, yang dimaksud *“Kebijakan Moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku bunga”*.

Kestabilan moneter sebuah negara adalah suatu kondisi yang memperlihatkan jumlah uang yang beredar mencukupi untuk mendukung seluruh transaksi dalam perekonomian. Dalam kondisi tersebut, jumlah uang yang beredar tidak berlebih ataupun kurang. Bila terjadi kekurangan atau kelebihan uang, maka pemerintah harus mengambil suatu tindakan atau kebijakan sehingga jumlah uang yang beredar kembali stabil.

## 2) Peranan Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter merupakan salah satu kebijakan di bidang ekonomi yang sangat berperan untuk mengatur dan menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Apabila jumlah uang yang beredar di suatu negara kurang dari yang dibutuhkan, negara yang bersangkutan cenderung mengalami kelesuan ekonomi. Begitu juga sebaliknya, jika uang yang beredar di suatu negara melebihi dari yang dibutuhkan, maka negara yang bersangkutan cenderung mengalami inflasi yang tinggi. Sehingga kestabilan ekonomi akan terganggu.

### 3) Tujuan Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter bertujuan untuk mencapai stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan keseimbangan neraca pembayaran internasional, kesempatan kerja, kestabilan harga, stabilitas ekonomi. Tujuan akhir sebuah kebijakan moneter adalah suatu kondisi ekonomi makro yang ingin dicapai. Tujuan tersebut tidak sama dari satu negara dengan negara lainnya serta tidak sama dari waktu ke waktu.

## 3. Inflasi dalam Ekonomi Syari'ah

Ekonomi Islam Taqiuddin Ahmad ibn Al-Maqrizi (1364 M - 1441 M), yang merupakan salah satu murid dari Ibn Khaldun, menggolongkan inflasi dalam dua golongan yaitu:<sup>15</sup>

### a. *Natural Inflation*

---

<sup>15</sup> Adiwarman A Karim,...., hlm. 140.

Sesuai dengan namanya, inflasi jenis ini di akibatkan oleh sebab-sebab alamiah di mana orang tidak mempunyai kendali atasnya (dalam hal mencegah). Ibn Al-Maqrizi mangatakan bahwa inflasi ini adalah inflasi yang di akibatkan oleh turunnya Penawaran Agregatif (AS) atau naiknya Permintaan Agregatif (AD). Maka natural inflation akan dapat di bedakan berdasarkan penyebabnya manjadi dua golongan yaitu sebagai berikut :

- 1) Akibat uang yang masuk dari luar negeri terlalu banyak, dimana ekspor naik sedangkan impor turun sehingga nilai ekspor bersih sangat besar, maka mengakibatkan naiknya Permintaan Agregat (AD). Hal ini pernah terjadi pada masa pemerintahan khalifah Umar ibn al-Khattab r.a. Pada masa itu kafilah pedagang yang menjual barangnya di luar negeri membeli barang-barang yang mereka jual (*positive net export*). Adanya *positive net export* akan menjadikan keuntungan, keuntungan yang berupa kelebihan uang tersebut akan dibawa masuk ke Madinah sehingga pendapatan dan daya beli masyarakat akan naik. Naik nya Permintaan Agregatif, atau grafik dilukiskan sebagai kurva AD yang bergeser ke kanan, akan mengakibatkan naiknya tingkat harga secara keseluruhan .
- 2) Apa yang dilakukan oleh khalifah Umar Ibn al-Khattab r.a untuk mengatasi permasalahan tersebut? Beliau melarang penduduk Madinah untuk membeli barang-barang atau komoditi selama 2 hari berturut-turut. Akibatnya adalah turunnya Permintaan Agregatif (AD) dalam

perekonomian. Setelah pelarangan tersebut berakhir maka tingkat harga kembali normal.

- 3) Akibat dari turunnya tingkat produksi (*Aggregate Supply* [AS]) karena terjadinya paceklik, perang, ataupun embargo atau boikot. Hal ini pernah terjadi pula pada masa pemerintahan khalifah Umar bin Khattab yaitu pada saat terjadi paceklik yang mengakibatkan kelangkaan gandum, atau dapat digambarkan pada grafik kurva AS bergeser ke kiri, yang kemudian mengakibatkan naiknya tingkat harga-harga. Apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab r.a. terhadap permasalahan ini? Beliau melakukan impor gandum dari Fustat-Mesir sehingga penawaran Agregatif (AS) barang di pasar kembali naik yang kemudian berakibat pada turunnya tingkat harga-harga.

Jadi inflasi yang terjadi karena sebab-sebab yang alamiah, atau murni karena tarikan permintaan dan penawaran, maka pemerintah tidak perlu khawatir. Karena solusi yang dapat dilakukan adalah dengan menstabilkan baik permintaan agregat maupun penawaran agregat pada kondisi semula sebelum terjadinya kenaikan harga atau inflasi.

#### *b. Human Error Inflation*

Selain dari penyebab-penyebab yang dimaksud pada *natural inflation*, maka inflasi-inflasi yang disebabkan oleh hal-hal lainnya dapat digolongkan sebagai *human error inflation* atau *false inflation*.

*Human error inflation* dikatakan sebagai inflasi yang disebabkan oleh kesalahan-kesalahan dari manusia itu sendiri. Human error inflation dapat dikelompokkan menurut penyebab-penyebabnya sebagai berikut:<sup>16</sup>

1) Korupsi dan administrasi yang buruk.

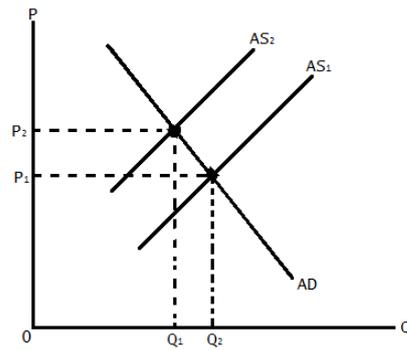
Korupsi akan menaikkan tingkat harga, karena produsen harus menaikkan harga jual pada produksinya untuk menutupi biaya-biaya “siluman” yang telah mereka bayarkan. Birokrasi perijinan yang berbelit-belit, dimana hanya untuk pengurusan suatu izin harus melalui beberapa instansi, hal ini tentu akan menambah biaya produksi dari produsen dan berakibat pada kenaikan harga. Hal yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menghilangkan korupsi dan melakukan reformasi birokrasi.

Jika menggunakan pendekatan kepada permintaan agregat (AD) dan penawaran agregat (AS), maka korupsi dan administrasi yang buruk akan menyebabkan kontraksi pada kurva penawaran agregat, yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga. Selain menyebabkan inefisiensi alokasi sumber daya dan ekonomi biaya tinggi, korupsi dan administrasi yang buruk akan dapat menyebabkan perekonomian terpuruk.

Inflasi yang disebabkan korupsi dan administrasi yang buruk.

---

<sup>16</sup> Adiwarmanto A Karim, *Ekonomi Makro ...*, h. 143.



## 2) Pajak yang berlebihan (*excessive tax*)

Efek yang ditimbulkan oleh pengenaan pajak yang berlebihan pada perekonomian akan memberikan pengaruh yang sama dengan pengaruh yang ditimbulkan oleh korupsi dan administrasi yang buruk yaitu terjadinya kontraksi pada kurva penawaran agregat. Jika dilihat lebih lanjut, pajak yang berlebihan mengakibatkan pada *efficiency loss* atau *dead weight loss*. Ini termasuk masalah pula dalam perekonomian di Indonesia, terutama pasca penerapan otonomi daerah, dimana setiap daerah memiliki kebijakan tersendiri dalam menggali sektor-sektor yang dapat dijadikan sebagai obyek untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

### c. Pencetakan uang dengan maksud menarik keuntungan yang berlebihan (*excessive seignorage*).

Seignorage arti tradisionalnya adalah keuntungan dari pencetakan koin yang didapat oleh percetakannya dimana biasanya pencetakan tersebut dimiliki penguasa. Pencetakan uang yang terlalu berlebihan akan mengakibatkan terlalu banyaknya jumlah uang beredar di masyarakat, hal ini

berimplikasi pada penurunan nilai mata uang. Hal ini telah terbukti diIndonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, dimana kebutuhan anggaran pemerintah dibiayai oleh percetakan uang. Namun Karena berlebihan hal ini dapat menyebabkan terjadinya inflasi.

#### **4. Pengendalian Inflasi dalam Ekonomi Syari'ah**

Kebijakan moneter atau politik moneter merupakan politik negara dalam menentukan peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan dalam lapangan keuangan negara.<sup>17</sup> Secara lebih khusus kebijakan moneter mempunyai pengertian sebagai tindakan makro pemerintah melalui bank sentral dengan cara mempengaruhi penciptaan uang. Dengan mempengaruhi proses penciptaan uang, pemerintah bisa mempengaruhi jumlah uang beredar, yang selanjutnya pemerintah bisa mempengaruhi pengeluaran investasi, kemudian mempengaruhi permintaan agregat dan akhirnya tingkat harga sehingga tercipta kondisi ekonomi sebagaimana yang dikehendaki.

Kebijakan moneter dalam Islam berbijak pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam sebagai berikut ; (a) Kekuasaan tertinggi adalah milik Allah dan Allahlah pemilik yang absolut. (b) Manusia merupakan Pemimpin (kholifah) di bumi, tetapi bukan pemilik yang sebenarnya. (c) Semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah karena seizin Allah, dan oleh karena itu saudara-saudaranya yang kurang beruntung memiliki hak atas

---

<sup>17</sup> Taqyudin An Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (Surabaya:Risalah Gusti, 1996), h. 52

sebagian kekayaan yang dimiliki saudara- saudaranya yang lebih beruntung. (d) Kekayaan tidak boleh ditumpuk terus atau ditimbun. (e) Kekayaan harus diputar. (f) Menghilangkan jurang perbedaaan antara individu dalam perekonomian, dapat menghapus konflik antar golongan. (g) Menetapkan kewajiban yang sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu, termasuk bagi anggota masyarakat yang miskin. Dalam aspek teknis, kebijakan moneter Islam harus bebas dari unsur riba dan bunga bak. Dalam Islam riba, yang termasuk didalamnya bunga bank diharamkan secara tegas. Dengan adanya pengharaman ini maka bunga bank yang dalam ekonomi kapitalis menjadi instrument utama manajemen moneter menjadi tidak berlaku lagi. Menejement moneter dalam Islam didasarkan pada prinsip bagi hasil.

Kebijakan moneter merupakan bagian integral dari kebijakan ekonomi makro. Tujuan kebijakan ekonomi makro umumnya adalah mencapai kemakmuran masyarakat (social welfare). Untuk mencapai tujuan kebijakan moneter sebagaimana sudah diungkapkan di atas, maka bank sentral mengeluarkan berbagai instrumen atau alat untuk mempengaruhi situasi perekonomian sehingga bisa sesuai dengan tujuan yang diharapkan pemerintah. Kebijakan moneter dengan sasaran tunggal, yaitu stabilisasi harga (pengendalian tingkat inflasi), pada umumnya menggunakan pendekatan harga. Sedangkan kebijakan moneter dengan sasaran multi, yaitu disamping stabilisasi harga juga pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, dan keseimbangan neraca

pembayaran, pada umumnya menggunakan pendekatan kuantitas.<sup>18</sup>

### C. Pembahasan

#### **Pengendalian inflasi dengan menggunakan Instrumen Moneter Syariah di Lampung**

Inflasi yang terjadi di Lampung terjadi karena beberapa sebab. Dalam ekonomi Islam, inflasi dikelompokkan menjadi dua golongan yaitu:

1. *Natural Inflation* (Inflasi Alamiah) Sesuai dengan namanya, inflasi jenis ini disebabkan oleh berbagai faktor alamiah yang tidak bisa dihindari umat manusia.
2. *Human Error Inflation* (Inflasi Karena Kesalahan Manusia)

Selain faktor alam, Al Maqrizi menyatakan bahwa inflasi dapat terjadi akibat kesalahan manusia. Ia telah mengidentifikasi tiga hal yang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyebabkan terjadinya inflasi ini. Ketiga faktor tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Korupsi dan administrasi yang buruk,
- b. Pajak yang berlebihan,
- c. Dan peningkatan sirkulasi mata uang fulus.

Ada dua jenis kebijakan moneter yang dilakukan di Indonesia, kebijakan ekspansif dan kebijakan kontraktif. Pengendalian terhadap inflasi dilakukan dengan melakukan kebijakan-kebijakan moneter melalui

---

<sup>18</sup> Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan. "Kebijakan Moneter dan Perbankan"*, (Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia : 2005), h. 47

instrumen- instrumen moneter sebagai alatnya. Instrumen- instrumen moneter syariah yang diterapkan di Indonesia merupakan ciri kebijakan moneter ganda yang dilakukan oleh Bank Indonesia, dimana pelaksanaannya berbarengan dengan instrumen-instrumenmoneter konvensional.

### **Efektivitas Instrumen moneter syariah terhadap pengendalian inflasi di Lampung**

Pengendalian inflasi dalam politik ekonomi islam utamanya adalah menghindari penggunaan instrumen yang berbasis *Riba* (bunga), menghindari *gharar*, *maysir* dan *zhulum*. Pengendalian inflasi di Indonesia diperankan oleh 3(tiga) pihak: *pertama*; oleh Otoritas Moneter, yaitu Bank Indonesia sebagai penerima amanat Undang-Undang. *Kedua*, Pemerintah, yaitu berbagai kementerian dibawah kordinasi menteri ekonomi bersama dengan pemerintah daerah dan *ketiga*; masyarakat dalam arti luas, selaku pelaku ekonomi. Uraian berikut ini adalah cara-cara pengendalian inflasi oleh ketiga pihak diatas sesuai yang sejalan dengan politik Ekonomi Islam.

Mengendalikan inflasi menggunakan instrumen moneter syariah utamanya adalah menghindari penggunaan instrumen yang berbasis *Riba* (bunga), menghindari *gharar*, *maysir* dan *zhulum*. Pengendalian inflasi di Indonesia diperankan oleh 3(tiga) pihak: *pertama*; oleh Otoritas Moneter, yaitu Bank Indonesia sebagai penerima amanat Undang-Undang. *Kedua*, Pemerintah, yaitu berbagai kementerian dibawah kordinasi menteri ekonomi bersama

dengan pemerintah daerah dan *ketiga*; masyarakat dalam arti luas, selaku pelaku ekonomi.

Di Lampung, hal ini belum maksimal dilakukan. Karena kurangnya koordinasi dalam pelaksanaannya. SBSN yang ada di Lampung pun belum bergerak pada sektor riil. Jika hal ini berlangsung terus menerus, maka keadaan instrumen moneter syari'ah diragukan untuk bisa mengendalikan inflasi meskipun perbankan syari'ah masih terbilang stabil dalam kegiatannya.

Perlu sinergi yang intens antara BI, Pemda Lampung dan masyarakat untuk bisa memaksimalkan efektivitas pengendalian inflasi dengan menggunakan instrumen moneter syari'ah ini.

#### **D. Kesimpulan**

Setelah mempelajari uraian dari bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Instrumen moneter syari'ah di Lampung sudah terlihat cukup menggeliatkan perekonomian, hanya saja belum merata. Hal ini terlihat dari pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan kementerian yang menggunakan salah satu intrumen tersebut, yaitu SBSN (Surat Berharga Syari'ah Nasional) atau sukuk negara. Namun baru sebatas pertumbuhan ekonomi dimana pengendalian inflasi dengan menggunakan instrumen moneter syariah di Lampung masih belum bisa dirasakan keberadaanya.
2. Instrumen moneter syariah terhadap pengendalian inflasi di Lampung masih belum begitu efektif dikarenakan belum meratanya pembangunan yang menggunakan investasi sukuk negara (SBSN) ini.

## E. Referensi

- Al Ghazali, Abu Hamid, *Kimya-e-Sa'adat*, Lahore : Naashraan-e-Quran Ltd, 1973
- Al Maqrizi, *Ighatsah al Ummah bi Kasyf al Ghummah*, Kairo : Maktabah al Tsafaqah al Diniyah, 1986
- Al Shadr, Al Sahid Sayid Mohammed Baqir, *Iqtishaduna*, Beirut : Dar al Fikr, 1389 H
- Aliminsyah, Padji. *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan*, Bandung:Yrama Widya, 2016
- Amalia, Euis, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, Jakarta : Pustaka Asatrus, 2005
- Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani, 2004
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 1993
- Ashshiddiqi, Hasbi, et. al, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, , 1991
- Bâqy, Muhammad Fuâd Abdul, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz Al-Qur'ân al-Karîm*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1981
- Blinder, Alan, *Hard Heads, Soft Hearts : Tough Minded Economics for a Just Society*, M. A. Edison Wesley, 2007
- Boediono, *Ekonomi Makro*, Yogyakarta: BPFE, 2009
- \_\_\_\_\_, *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 5: Teori Moneter*, Yogyakarta: BPFE, 2009
- Chapra, Umer, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, Jakarta : Gema Insani press, 1989
- \_\_\_\_\_, *Sistem Moneter Islam*, Jakarta :Gema Insani Press, 2000
- \_\_\_\_\_, *Islam dan Tantangan Ekonomi Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, Surabaya : Risalah Gusti, 1999

- Dimiyati, Ahmad, *Teori Keuangan Islam Rekonstruksi Metodologis Terhadap Teori Keuangan Al-Ghazali*. Yogyakarta: UII Press, 2008
- El Diwany, Tarek, *The Problem with Interest (Sistem bunga dan Permasalahannya)*, Jakarta: Akbar, 2003
- Feldstein, Martin, *The Cost and Benefits of Price Stability*, Univ. Chicago Press, 1999
- Greenwald, Douglas, *Encyclopedia of Economic*, New York : McGraw-Hill Inc. , 1982
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research I*, Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM, 1976
- Huda, Nurul, et al., *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: Kencana, 2018
- Kahf, Monzer, *Ekonomi Islam (Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonc.... Islam)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015
- Karim, Adiwarmanto A., *Ekonomi Makro Islami*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- \_\_\_\_\_, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada : 2006
- Khaldun, Muhammad bin, *Mukaddimah*, Beirut : Dar al Kitab, 2001
- Landsburg, S. E., L. J. Feinstone, *Macroeconomics*, New York : McGraw-Hill Inc., 1997
- Mankiw, N. Gregory, *Macro Economics*, USA : Worth Publishers, 2007
- Mannan, M. Abdul, *Ekonomi Islam:Teori dan Praktek*, Jakarta : PT. Intermasa, 1992
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Karya, 1989
- Nasional, Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Nasir, Mohammad, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1999

- Nopirin, *Ekonomi Moneter*, BPFE, Yogyakarta, 1987
- Poerwadarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : PT Balai Pustaka, 1983
- Pohan, Aulia, *Kerangka Kebijakan Moneter dan Implementasinya di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008
- Qordhawi, Yusuf, *Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishadil Islami*, Terjemah oleh Zainal Arifin dan Dahlia, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam 1*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Reading, Hugo F., *Kamus Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta : Rajawali Pers, 1986
- Ridwan, M., *Ekonomi Makro dan Mikro Islam*, Jakarta : Citapustaka Media, 2013
- Saeed, Abdullah, *Islamic Banking and Interest A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, Terj. Muhammad Ufuqul Mubin, et al, "Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003
- Samuelson, Paul A., William D. Nordhaus, *Economics*, New York : McGraw-Hill Inc. , 1992
- Saud, Mahmud Abu, *GBEI (Garis Besar Ekonomi Islam)*, Jakarta : PT. Gema Insani Press, 1996
- Sholahuddin, M., *Lembaga Ekonomi Keuangan & Keuangan Islam*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2006
- Singarimbun, Masri, et. al, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta : LP3ES, 1989
- Smith's, Adam, *The Wealth of Nations*, UK : Infinite Ideas Limited, 2009
- Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Ekonissia, 2002
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, Bandung : Alfabeta, 2008
- Sukanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Press, 1986
- Sukirno, Sadono, *Makro EKonomi*, Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2000

- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Rajawali Press, 1992
- Triandaru, Sigit, *Ekonomi Makro Pendekatan Kontemporer*, Jakarta : Salemba Empat, 2000
- Warsito, Hermawan, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta : Gramedia, 1996
- Wirnyaningsih et. al, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005
- Yusanto, Ismail, *Mencari Solusi Krisis Ekonomi. Dalam buku Dinar Emas Solusi Krisis Moneter*, Jakarta: PIRAC, SEM Institute, Infid, 2001

#### **Jurnal dan Artikel**

- Ascarya, *Alur Transmisi dan Efektifitas Kebijakan Moneter Ganda di Indonesia*, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Vol. 14 No. 3, Januari 2012
- Atmadja, Adwin S. *Inflasi Di Indonesia : Sumber-Sumber Penyebab dan Pengendaliannya*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 1, No. 1, Mei 1999
- Bayuni, Eva Misfah, Ascarya, *Analisis Pengaruh Instrumen Moneter Terhadap Stabilitas Besaran Moneter Dalam Sistem Moneter Ganda Di Indonesia*, Jurnal Tazkia, Islamic Finance & Business Review, Vol. 5, 2010
- Dwijayanthi, Febrina, Prima Naomi, *Analisis Pengaruh Inflasi, BI Rate, dan Nilai Tukar Mata Uang terhadap Profitabilitas Bank Periode 2003-2007*, Jurnal Karisma Vol. 3, 2009
- Erawati, Neny, Richard Llewelyn, *Analisa Pergerakan Suku Bunga dan Laju Ekspektasi Inflasi Untuk Menentukan Kebijakan Moneter di Indonesia*, Jurnal Manajemen & Kewirausahaan Vol. 4, No. 2, September 2002
- Hamdi, Edy Suandi, *Akar Krisis Ekonomi Global dan Dampaknya Terhadap Indonesia*, Jurnal Ekonomi Islam La Riba, Vol. III, 2009

- Hatta, M. *Telaah Singkat Pengendalian Inflasi Dalam Perspektif Kebijakan Moneter Islam*, Jurnal Ekonomi Ideologis, 16 Juni 2008
- Juoro, Umar, *Model Kebijakan Moneter dalam Perekonomian Terbuka untuk Indonesia*, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Juli 2013
- Natsir, M. *Analisis Empiris Efektivitas Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Di Indonesia Melalui Jalur Nilai Tukar Periode 1990–2007*, Jurnal Program Pascasarjana Unhalu Kendari
- \_\_\_\_\_, *Peranan Jalur Suku Bunga Dalam Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia*, Jurnal Program Pascasarjana Unhalu Kendari
- Pangiuk, Ambok, *Inflasi pada Fenomena Sosial Ekonomi: Menurut Al-Maqrizi*, Jurnal Kontekstualita, Vol. 28, No. 1, 2013
- Putra, M. Umar Maya, *Peran Dan Kebijakan Moneter Terhadap Perekonom..... SumUt*, Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil Vol 5, No 01, Oktober 2015
- Riani, Westi, *Inflasi dan Tinjauannya dalam Perspektif Islam*, Jurnal Kinerja Vol. 5, 1 Agustus 2003
- Sarker, Awwal, *Moneter Policy and Islamic Bank in Bangladesh*, International Journal of Islamic Financial Services Vol.2 No.1
- Setiawan, Aziz Budi, *Perbankan Syariah; Challenges dan Opportunity Untuk Pengembangan di Indonesia*, Jurnal Kordinat, Edisi: Vol. VIII No. 1, April 2006
- Simorangkir, Iskandar, *Koordinasi Kebijakan Moneter dan Fiskal di Indonesia: Suatu Kajian dengan Pendekatan Game Theory*. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, vol. 9, no. 3, Januari 2007.
- Sitompul, Zulkarnain, *Kemungkinan Penerapan Universal Banking System di Indonesia*, jurnal Hukum Bisnis, Volume 20, Agustus-September 2002
- Subagyo, Ahmad, *Pengendalian Inflasi Dalam Sistem Ekonomi Non Bunga (Kajian Ekonomi Moneter dalam perspektif Islam)*, Jurnal Economicus, vol. 3 No. 1 – Juni 2010

### **Internet**

*<http://bi.go.id>*

*<http://bps.go.id>*

*<http://ojk.go.id>*